

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN
ANGGARAN 2021

2021

PERDA KAB. LUWU TIMUR NOMOR 12, LD 12 TAHUN 2021/ 12 HLM
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021

ABSTRAK

- : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh Persetujuan Bersama.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 12 Tahun 1985 Sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 1994; UU No.7 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; Undang-Undang No.1 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU no.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.109 Tahun 2000; PP No.23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.74 Tahun 2012; PP No.55 Tahun 2005; PP No.5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PP No.1 Tahun 2018; PP No.71 Tahun 2010; PP No.12 Tahun 2017; PP No.18 Tahun 2017; PP No.56 Tahun 2018; PP No.12 Tahun 2019; PP No.13 Tahun 2019; Permendagri No.32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Permendagri No.123 Tahun 2018; Permendagri No.52 Tahun 2012; Permendagri No.62. Tahun 2017; Permendagri No.36 Tahun 2018; Permendagri No.64 Tahun 2020; Permendagri No.77 Tahun 2020; Permendagri No.9 Tahun 2021; Permendagri No.9 Tahun 2021; Perda Kab. Lutim No.11 Tahun 2020
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi. Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran. Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan keuangan Negara; Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM. Singkronisasi Program, kegiatan dan sub Kegiatan Pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD. Singkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah. Daftar perubahan Jumlah pegawai Per Golongan dan Per Jabatan. Daftar Piutang Daerah.

CACATAN

- : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Oktober 2021 dan ditetapkan 13 Oktober 2021
- Pernjabaran Perubahan APBD diatur dengan Peraturan Bupati